

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angkutan umum dalam kehidupan sehari – hari memegang peranan penting dalam suatu kehidupan perkotaan. Secara khusus angkutan umum berfungsi sebagai mobilitas masyarakat di suatu wilayah atau kawasan tertentu, seperti kawasan industri, pemukiman warga, maupun wilayah sekitar kampus yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Perkembangan kebutuhan penduduk Yogyakarta akan pentingnya sebuah alat transportasi khususnya kebutuhan bus perkotaan yang mayoritas menjadi sarana angkutan masyarakat untuk dapat berpergian ke tempat yang dituju merupakan sebuah permasalahan besar pemerintah dalam pengelolaannya. Angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibukota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

Efisiensi dalam penyediaan angkutan umum akan berdampak positif terhadap sistem transportasi secara keseluruhan. Seperti yang dijelaskan pada UU No 14/1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 35 menyatakan bahwa kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan memungut bayaran hanya dilakukan pada kendaraan umum.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta telah banyak pelayanan angkutan umum yang dimiliki oleh pihak swasta maupun pemerintah seperti KOPATA, ASPADA, KOBUTRI, PUSKOPKAR, dan DAMRI UBK (Unit Bus Perkotaan). Sampai saat ini armada angkutan yang beroperasi kurang lebih 591 armada dengan 19 trayek (jalur) dan jumlah pengemudi yang ada kurang lebih 825 orang (Organisasi Angkutan Darat, 2006).

- a. Salah satu permasalahan yang muncul dalam mengelola angkutan umum bus perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah bagaimana cara menentukan tarif yang harus dibayarkan oleh penumpang setiap kali bahan bakar minyak (BBM) mengalami kenaikan harga. Mengingat perlunya kebutuhan bahan bakar minyak untuk pengoperasiannya serta harga kebutuhan lain yang cenderung naik maka perlu diadakan *survey* penelitian tentang pendapatan bus kota/unit dari tarif yang telah ditetapkan. Dikarenakan naiknya harga bahan bakar minyak per 1 Oktober tahun 2005 oleh pemerintah pusat maka tarif angkutan umum yang dikeluarkan perusahaan angkutan di Daerah Istimewa Yogyakarta secara reguler naik. Selain penentuan jaringan pelayanan transportasi, penentuan jumlah kendaraan, umur kendaraan serta jenis kendaraan yang berlaku masih ada unsur lain yang di bawah kendali Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah penentuan tarif angkutan umum bus perkotaan. Dalam perhitungan tarif yang dipergunakan pada angkutan umum di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam UU No. 14/1992 pada pasal 42 yang menyatakan “struktur dan golongan tarif

angkutan dengan kendaraan umum ditetapkan oleh pemerintah“. Namun pihak pengelola angkutan bus perkotaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan metoda pendekatan biaya operasional kendaraan (BOK) yang berarti tarif angkutan umum yang ditetapkan berdasarkan biaya operasi kendaraan ditambah sejumlah persentase keuntungan yang diperkenankan dan seluruh rinciannya menjadi usulan kepada Gubernur melalui Organisasi Angkutan Darat dan kemudian Gubernur yang memutuskan tentang penetapan tarif angkutan penumpang bus perkotaan dan angkutan penumpang antar kota dalam propinsi (AKDP) melalui SK Gubernur DIY No.144/KEP/2005 yang terlampir pada lampiran 1 dan lampiran 2.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dihadapi oleh pemilik angkutan umum bus perkotaan di Yogyakarta saat ini adalah tarif yang ditetapkan oleh pemerintah propinsi tidak mampu untuk menutupi biaya operasional kendaraan (BOK) bus perkotaan per bulannya. Secara otomatis pemilik angkutan bus perkotaan menginginkan harga tarif yang harus dibayarkan oleh penumpang bus perkotaan naik dari harga tarif yang diberlakukan sekarang dengan alasan harga onderdil kendaraan dan kebutuhan lainnya sangat berpengaruh besar mengapa tarif angkutan itu harus dinaikkan.

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden No 55/2005 tertanggal 30 September Tahun 2005 tentang kenaikan harga bahan bakar minyak telah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi pemilik angkutan. Tarif angkutan umum dalam hal ini bus perkotaan maupun angkutan pedesaan yang harus dibayarkan

oleh pengguna jasa transportasi mengalami kenaikan. Banyak cara untuk mengelompokkan biaya berkaitan dengan pengoperasian angkutan umum. Untuk memudahkan dan mengikuti petunjuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maka dalam perhitungan biaya pokok angkutan digolongkan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan secara langsung terhadap pengoperasian kendaraan yang berhubungan dengan kilometer operasi kendaraan. Sedangkan untuk biaya tidak langsung yaitu biaya penunjang yang berkaitan secara tidak langsung dengan kilometer operasional kendaraan, akan tetapi tetap dibutuhkan agar pelaksanaan operasional kendaraan dapat terus berjalan dengan lancar.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapatan/setoran yang diterima pemilik angkutan umum bus perkotaan selama satu bulan melalui pendapatan/setoran per harinya serta total biaya operasional kendaraan (BOK) yang harus dikeluarkan oleh pemilik armada angkutan bus perkotaan per bulannya.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini.

1. Agar dapat memberikan gambaran nyata kepada masyarakat luas sebagai pengguna jasa dan bagi pemilik angkutan umum bus perkotaan untuk dapat mengetahui perhitungan tarif angkutan yang seharusnya dibayarkan.
2. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi instansi – instansi terkait, seperti Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Dinas

Perhubungan guna meningkatkan pelayanan angkutan umum pada masyarakat, khususnya bagi pihak penyedia jasa angkutan umum bus perkotaan.

3. Menambah pengetahuan mengenai perhitungan biaya operasional kendaraan (BOK).

E. Batasan Penelitian

Penelitian ini di batasi dengan batasan – batasan yang ada di bawah ini.

1. Angkutan umum bus perkotaan yang diambil sebagai sampel penelitian adalah angkutan bus perkotaan Kopata 2 bus jalur 7 tahun buatan 1995, 1990 serta 2 bus jalur 5 tahun buatan 1995, 1982 yang dimulai dari titik awal armada bus itu beroperasi sampai akhir perjalanan bus itu berhenti beroperasi.
2. Perhitungan harga biaya operasional kendaraan (BOK) yang sebenarnya/unit bus dalam batasan waktu satu bulan bus itu beroperasi.
3. Pengambilan sampel data perhitungan jumlah naik turunnya penumpang, jarak tempuh serta waktu tempuh yang dilakukan selama satu bulan dengan penelitian sehari penuh bus itu beroperasi.
4. Pendapatan total pemilik armada angkutan umum bus perkotaan per bulannya.
5. Perhitungan nilai ekonomis kendaraan dari awal tahun kepemilikan sampai sekarang masih beroperasi.